

PERAN DIPLOMASI KOMERSIAL KJRI KARACHI DALAM MENDUKUNG EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA KE PAKISTAN: ANALISIS BERDASARKAN KERANGKA FAR

Sari Amalia¹, Nayottama Danendraduta Priyokusumo^{1*},

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding email: nayottamadd20@gmail.com

Abstract

This research examines the commercial diplomacy conducted by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Karachi to support Indonesia's palm oil exports to Pakistan, using Naray's FAR — facilitation (F), advisory (A), and representation (R) — commercial diplomacy framework. The method used in this research is a descriptive qualitative approach, employing literature studies and interviews as data collection techniques. Findings demonstrate that the Consulate General supported Indonesian palm oil exporters through business facilitation efforts, such as organizing business matching sessions to foster trade interactions. Additionally, the Consulate General provided advisory services through market intelligence and research-based reporting to exporters and government stakeholders. Lastly, its participation in promotional events and advocacy campaigns illustrates the representation role in enhancing Indonesia's commercial presence in Pakistan. This study highlights how the 'FAR' framework effectively operationalizes commercial diplomacy in supporting export strategies.

Keywords: Commercial Diplomacy, Indonesia Diplomacy, Pakistan, Palm Oil Export

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik diplomasi komersial yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi dalam mendukung ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan, dengan menggunakan kerangka kerja FAR dari Naray — facilitation (F), advisory (A), dan representation (R). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsulat Jenderal berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Pakistan melalui kegiatan business matching. Selain itu, fungsi advisory dijalankan dengan menyediakan laporan hasil riset pasar dan intelijen komersial kepada eksportir dan pemangku kebijakan Indonesia. Dalam konteks representation, Konsulat Jenderal turut serta dalam berbagai kegiatan promosi dan advokasi produk minyak sawit Indonesia di Pakistan. Penelitian ini menegaskan bahwa kerangka kerja 'FAR' mampu merepresentasikan secara efektif pelaksanaan diplomasi komersial dalam mendukung strategi ekspor nasional.

Kata Kunci: Diplomasi Komersial, Diplomasi Indonesia, Pakistan, Ekspor Minyak Sawit

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga kerja sama ekonomi internasional menjadi solusi melalui aktivitas ekspor dan

impor. Ekspor, sebagai aktivitas menjual barang atau jasa ke luar negeri, berkontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara, meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan (Hodijah & Angelina, 2021).

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor perkebunan yang

strategis dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Produk-produk perkebunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi komoditas utama ekspor, terutama minyak sawit. Pada tahun 2021, produk berbasis kelapa sawit menyumbang hingga 74,48% dari total ekspor sektor perkebunan, menjadikannya sebagai komoditas unggulan Indonesia di pasar global (Aulia, 2023).

Kelapa sawit, tanaman yang berasal dari Afrika, mulai dibudidayakan di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Pada tahun 1848, biji kelapa sawit pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor, kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Pengembangan perkebunan sawit kemudian menjadi sektor strategis nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Minyak sawit memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti tingkat produktivitas yang tinggi dan biaya produksi yang rendah. Selain itu, karakteristik fisik dan kimia minyak sawit menjadikannya bahan baku yang serbaguna dalam industri makanan, kosmetik, kimia, dan *biofuel* (PASPI, 2024). Kombinasi antara efisiensi dan multifungsi menjadikan permintaan global terhadap minyak sawit terus meningkat.

Namun, dominasi Indonesia dalam ekspor minyak sawit menghadapi tantangan besar, khususnya dari pasar Eropa. Sejak tahun 2017, Uni Eropa mulai mengeluarkan laporan dan regulasi yang mengaitkan industri minyak sawit dengan isu lingkungan dan sosial, seperti deforestasi dan pelanggaran HAM. Laporan seperti *Palm Oil and Deforestation of*

Rainforests (2017) dan regulasi terbaru *EU Deforestation-Free Regulation (EUDR)* pada tahun 2023, menambah hambatan ekspor ke pasar Eropa (GAPKI, 2024). Penerapan regulasi ini menyulitkan petani sawit skala kecil yang menguasai sekitar 41% lahan sawit nasional untuk menembus pasar Eropa karena keterbatasan sumber daya dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Situasi tersebut mendorong Indonesia untuk memperkuat akses ke pasar non-tradisional yang memiliki potensi besar, seperti Pakistan. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 245 juta jiwa, Pakistan memiliki tingkat konsumsi minyak nabati yang tinggi. Kebutuhan domestik yang besar tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal, sehingga sekitar 90% pasokan minyak sawit Pakistan bergantung pada Indonesia (Susanto, 2024).

Namun demikian, hubungan dagang Indonesia–Pakistan dalam komoditas ini tidak selalu stabil. Pada tahun 2022, kebijakan larangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah Indonesia sempat menimbulkan kekhawatiran di Pakistan. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan Indonesia menyebabkan gangguan rantai pasok, bahkan sempat mengancam kestabilan industri pangan di Pakistan saat itu. Di sisi lain, krisis politik dan ekonomi di Pakistan memperparah situasi, terutama setelah pengunduran diri Perdana Menteri Imran Khan yang terjadi hampir bersamaan dengan larangan ekspor tersebut.

Di luar faktor kebijakan ekspor, kondisi ekonomi makro di Pakistan juga memengaruhi efisiensi perdagangan. Pada akhir tahun 2022, bank sentral Pakistan menerapkan kebijakan pembatasan devisa guna menstabilkan cadangan dolar AS. Kebijakan ini membatasi transaksi impor, termasuk

untuk produk minyak sawit, dan menyebabkan gangguan dalam pembayaran serta aliran perdagangan antara kedua negara (Ahmed, 2022).

Dalam konteks inilah pentingnya keterlibatan aktif perwakilan diplomatik Indonesia di Pakistan. Indonesia memiliki dua perwakilan resmi, yaitu Kedutaan Besar di Islamabad dan Konsulat Jenderal di Karachi. Karachi, sebagai pusat keuangan Pakistan dan kota pelabuhan utama, memegang peranan strategis dalam perdagangan bilateral dan menjadi fokus utama aktivitas promosi ekonomi Indonesia. Sekitar 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Pakistan berasal dari Karachi, dan lebih dari 35% industri pengolahan minyak sawit Pakistan berada di wilayah Provinsi Sindh (Kementerian Luar Negeri, 2021).

Meskipun minyak sawit merupakan komoditas utama dalam hubungan dagang Indonesia–Pakistan, kajian akademik yang membahas bagaimana peran diplomatik dijalankan secara langsung oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Karachi masih sangat terbatas. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada diplomasi ekonomi Indonesia secara makro, tanpa mengulas bagaimana diplomasi dilakukan di tingkat perwakilan konsuler dalam konteks ketegangan ekonomi dan kebijakan.

Hal ini memunculkan pertanyaan analitis mengenai bagaimana bentuk respons diplomasi komersial Indonesia dalam menghadapi dinamika kebijakan ekspor, krisis ekonomi Pakistan, serta ketergantungan strategis terhadap produk minyak sawit Indonesia. Situasi ini memperlihatkan adanya teka-teki konseptual (*research puzzle*) terkait peran aktif aktor diplomatik Indonesia dalam menjaga keberlanjutan hubungan

dagang pada kondisi yang fluktuatif dan berisiko tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan celah kajian tersebut, pertanyaan utama yang diajukan adalah mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan diplomasi komersial oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi dalam mendukung ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan pada tahun 2022–2023.

Struktur penulisan ini terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang fenomena, celah kajian, serta pertanyaan penelitian. Bagian kedua membahas kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis praktik diplomasi komersial. Bagian ketiga memuat metodologi penelitian yang diterapkan. Bagian keempat menyajikan hasil temuan dan pembahasan secara tematik. Terakhir, bagian kelima menyimpulkan temuan utama berdasarkan pertanyaan penelitian.

KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis praktik diplomasi komersial yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi, kajian ini menggunakan tiga pendekatan teoritis yang disusun secara hierarkis: teori tingkat makro (*grand theory*), menengah (*middle-range theory*), dan terapan (*applied theory*). Setiap pendekatan memiliki fungsi konseptual yang berbeda dan tidak digunakan secara bersamaan dalam analisis, melainkan secara berjenjang. Teori makro memberikan fondasi epistemologis, teori menengah mempersempit fokus kajian, dan teori terapan digunakan secara operasional dalam menganalisis data lapangan.

Pertama, sebagai *grand theory*, penelitian ini menggunakan pendekatan *neoliberalisme institusional*. Teori ini merupakan pengembangan dari pemikiran liberalisme klasik yang berusaha menjawab kritik realisme terhadap potensi kerja sama internasional. Robert O. Keohane dalam karyanya *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (1984) menjelaskan bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, negara tetap dapat membangun kerja sama yang stabil dan saling menguntungkan melalui keberadaan institusi internasional. Institusi ini berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, memperkuat transparansi, dan menciptakan kepastian perilaku antarnegara.

Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, *neoliberalisme institusional* menjadi lensa epistemologis yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan dan aturan dalam menciptakan keterikatan jangka panjang. Teori ini relevan dalam menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai interaksi dua negara, tetapi sebagai bagian dari proses institusionalisasi hubungan dagang. Diplomasi komersial menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa hubungan ekonomi tetap terjaga melalui peran institusi negara seperti kedutaan dan konsulat.

Secara ontologis, *neoliberalisme institusional* melihat bahwa aktor negara bersifat rasional, namun sadar akan keuntungan dari kerja sama jangka panjang. Maka dari itu, negara membentuk dan mendukung institusi untuk memperkuat stabilitas hubungan, termasuk dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini, kehadiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi dapat dilihat sebagai manifestasi strategi

institusional negara dalam menjaga keberlanjutan kerja sama ekonomi Indonesia–Pakistan.

Kedua, sebagai *middle-range theory*, digunakan *teori perwakilan diplomatik*. Teori ini mempersempit fokus dari kerja sama internasional secara umum menjadi pada fungsi dan peran lembaga perwakilan luar negeri dalam sistem hubungan bilateral. Dalam kerangka ini, perwakilan diplomatik dipandang tidak hanya sebagai saluran komunikasi politik, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi dan budaya yang aktif. G.R. Berridge dalam bukunya *Diplomacy: Theory and Practice* (2015) menyatakan bahwa fungsi diplomatik terdiri dari komunikasi, negosiasi, pelaporan, serta promosi ekonomi dan budaya.

Dalam praktiknya, konsulat memainkan peran unik karena memiliki kedekatan dengan pelaku ekonomi lokal di negara tujuan. Tidak seperti kedutaan besar yang cenderung terfokus pada ibu kota, konsulat lebih dekat dengan pusat ekonomi dan perdagangan. Karachi, sebagai kota pelabuhan dan pusat keuangan Pakistan, merupakan lokasi strategis di mana diplomasi ekonomi sangat dibutuhkan. Fungsi-fungsi diplomatik di tingkat konsuler memungkinkan negara untuk bertindak lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar.

Lebih lanjut, pendekatan ini menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya domain elit pemerintahan pusat, tetapi dijalankan oleh aktor teknis di lapangan. Dalam konteks ini, teori perwakilan diplomatik memberi kerangka untuk memahami bagaimana konsulat menjalankan fungsi-fungsi strategis dalam mempromosikan kepentingan ekonomi nasional, termasuk dalam menghadapi hambatan kebijakan

seperti larangan ekspor atau krisis valuta asing di negara mitra.

Ketiga, sebagai *applied theory*, digunakan *kerangka kerja FAR* (*Facilitation, Advocacy, Representation*) yang dikembangkan oleh Olivier Naray (2008). Kerangka ini digunakan secara operasional dalam penelitian untuk mengklasifikasikan dan menganalisis kegiatan diplomasi komersial yang dilakukan di lapangan. Model ini banyak digunakan dalam studi kebijakan ekspor, pelayanan promosi perdagangan, dan efektivitas diplomasi ekonomi di negara berkembang.

Facilitation dalam kerangka ini merujuk pada peran perwakilan diplomatik dalam membuka peluang bisnis, menghubungkan eksportir dengan mitra potensial, serta mengurangi hambatan logistik dan administratif. *Advocacy* mencakup kampanye komunikasi, promosi produk unggulan, serta intervensi strategis dalam forum bisnis atau regulasi lokal. *Representation* menekankan pentingnya kehadiran simbolik dan formal negara dalam pameran internasional, kegiatan dagang, serta interaksi dengan asosiasi pelaku usaha dan otoritas perdagangan lokal.

Kerangka ini sangat cocok diterapkan dalam studi ini karena sifatnya yang praktis, aplikatif, dan fokus pada kegiatan nyata diplomasi ekonomi. *FAR framework* memungkinkan pengklasifikasian aktivitas-aktivitas Konsulat Jenderal RI di Karachi seperti *business matching*, penyampaian laporan intelijen pasar, serta partisipasi dalam *Pakistan Oilseed Summit* atau kerja sama dengan importir besar minyak sawit di Karachi.

Penting untuk dicatat bahwa hanya *kerangka FAR* yang digunakan secara langsung dalam tahap analisis data. Dua

teori sebelumnya digunakan untuk membentuk kerangka konseptual, memahami posisi dan fungsi institusi diplomatik dalam kerangka hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, namun tidak dijadikan alat analisis terhadap data empiris.

Tiga pendekatan teoritis ini digunakan secara hierarkis dan saling melengkapi. *Neoliberalisme institusional* memberikan fondasi ontologis dan epistemologis bahwa diplomasi komersial merupakan instrumen kelembagaan kerja sama ekonomi antarnegara. *Teori perwakilan diplomatik* memperjelas posisi dan mandat institusi perwakilan dalam konteks bilateral. Sementara itu, analisis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui operasionalisasi *kerangka kerja FAR*, yang menjelaskan secara langsung bagaimana aktivitas diplomatik dijalankan oleh perwakilan Indonesia dalam konteks promosi ekspor minyak sawit di Pakistan. Dengan struktur ini, penelitian dapat membangun hubungan konseptual yang utuh dari teori ke praktik, dari struktur ke tindakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, konteks, dan makna dari praktik diplomasi komersial yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada (Creswell, 2016). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas hubungan antaraktor dan dinamika kebijakan

ekspor dalam konteks hubungan bilateral.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus tunggal instrumental. Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam satu unit analisis, yakni aktivitas diplomasi komersial yang dilakukan oleh KJRI Karachi dalam mendukung ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan. Studi kasus tunggal dianggap tepat karena fokus penelitian diarahkan untuk mendalami satu kasus dengan intensitas tinggi, tanpa membandingkan dengan kasus lain. Yin (2014) menjelaskan bahwa studi kasus dapat digunakan ketika peneliti ingin memahami “bagaimana” suatu fenomena terjadi dalam konteks kehidupan nyata dan ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas.

Pendekatan kualitatif juga sejalan dengan penggunaan *kerangka kerja FAR* sebagai teori terapan dalam penelitian ini. *Kerangka FAR*—yang terdiri dari *facilitation*, *advocacy*, dan *representation*—mengharuskan peneliti untuk menganalisis aktivitas-aktivitas diplomatik secara mendalam, berdasarkan narasi, pengalaman, dan dokumentasi empirik. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat non-numerik dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi makna dan kecenderungan dari praktik diplomasi komersial tersebut. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan tindakan diplomatik dalam konteks ekonomi secara lebih terstruktur dan kontekstual.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, dengan fokus pada kota Karachi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan di Pakistan. Kota ini merupakan lokasi pelabuhan utama dan pusat industri yang menjadi target ekspor minyak sawit Indonesia. Karachi juga merupakan lokasi strategis

bagi kegiatan promosi ekonomi yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Indonesia. Dengan demikian, pemilihan KJRI Karachi sebagai lokasi studi memungkinkan peneliti untuk mengakses data yang relevan dengan peran aktor diplomatik dalam konteks perdagangan bilateral.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Narasumber terdiri dari diplomat di KJRI Karachi, pejabat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri RI, serta pelaku ekspor yang terlibat dalam perdagangan minyak sawit ke Pakistan. Kriteria pemilihan narasumber mencakup keterlibatan langsung dalam kebijakan ekspor, pengalaman menangani promosi ekonomi, dan kapasitas institusional dalam perumusan strategi diplomasi ekonomi.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan dimensi dalam *kerangka FAR*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjaga fokus wawancara sekaligus membuka ruang untuk eksplorasi narasi dan pengalaman narasumber secara bebas. Wawancara dilakukan secara daring melalui platform konferensi video seperti Zoom dan Google Meet, mengingat pertimbangan geografis dan waktu. Setiap wawancara berdurasi antara 45 hingga 90 menit, direkam dengan izin, dan ditranskripsi secara verbatim untuk keperluan analisis.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi kelembagaan. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan diplomasi

ekonomi Kementerian Luar Negeri, publikasi resmi KJRI Karachi, dan dokumen hasil forum dagang seperti *Pakistan Oilseed Summit* atau *Palm Oil Importers Roundtable*. Selain itu, berita dari media massa arus utama seperti The Jakarta Post, Dawn News Pakistan, dan Antara News digunakan untuk melacak perkembangan kebijakan dan persepsi publik. Keandalan sumber dijaga dengan membandingkan data dari beberapa sumber dan memverifikasinya dengan informasi dari wawancara.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini dipilih karena cocok digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema yang muncul dari data. Proses analisis dimulai dengan pengkodean terbuka terhadap transkrip wawancara dan dokumen sekunder, kemudian dikategorikan berdasarkan tiga dimensi utama dalam *kerangka FAR*: facilitation, advocacy, dan representation. Setiap aktivitas diplomatik yang ditemukan dalam data diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori, yang kemudian dianalisis untuk melihat peran, tujuan, dan hasilnya dalam konteks promosi ekspor.

Tahapan analisis dilakukan secara iteratif dan siklik. Setelah kategori awal terbentuk, peneliti melakukan pembacaan ulang data, mengevaluasi konsistensi kategori, serta membangun relasi antar-tema. Proses ini menghasilkan sintesis tematik yang menggambarkan peran strategis diplomasi komersial dalam konteks hubungan dagang bilateral Indonesia–Pakistan. Validitas temuan diperkuat melalui teknik triangulasi sumber (perbandingan antarwawancara dan dokumen) serta konfirmasi dari narasumber melalui proses *member*

checking untuk memastikan akurasi interpretasi.

Posisi peneliti dalam penelitian ini bersifat sebagai pengamat partisipatif terbatas. Meskipun peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan diplomasi, peneliti memiliki akses terhadap pelaku utama serta dokumen internal yang relevan. Posisi ini memberikan keuntungan dalam membangun kedekatan dengan subjek tanpa mengganggu proses diplomatik yang berlangsung, serta menjaga objektivitas dalam analisis. Peneliti berupaya mempertahankan reflektivitas dan kesadaran terhadap potensi bias selama seluruh proses pengumpulan dan interpretasi data.

Metodologi ini memungkinkan penelitian ini menjawab secara mendalam pertanyaan utama tentang bagaimana bentuk implementasi diplomasi komersial yang dilakukan oleh KJRI Karachi. Pendekatan ini juga memberikan pemahaman kontekstual mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diplomasi ekonomi, seperti hambatan kebijakan, krisis devisa, dan dinamika hubungan bilateral. Dengan menggunakan analisis tematik berbasis teori terapan *FAR*, penelitian ini menghasilkan pemetaan empiris yang terstruktur atas peran strategis aktor diplomatik Indonesia dalam mendukung ekspor minyak sawit di pasar non-tradisional.

PEMBAHASAN

Diplomasi Komersial dalam Dimensi Facilitation

Dalam konteks diplomasi komersial, dimensi *facilitation* merujuk pada upaya perwakilan diplomatik untuk menghubungkan pelaku usaha, mengurangi hambatan perdagangan,

serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan ekspor. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Karachi secara aktif menjalankan fungsi ini dengan memfasilitasi interaksi antara eksportir Indonesia dan importir Pakistan dalam sektor minyak sawit.

Salah satu bentuk konkret dari fungsi *facilitation* adalah penyelenggaraan kegiatan *business matching* dan temu bisnis bilateral. Pada tahun 2022 dan 2023, KJRI Karachi secara rutin mengorganisir forum dagang, termasuk pertemuan khusus antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan asosiasi pengimpor minyak Pakistan. Kegiatan ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan informasi, memperkenalkan produk baru, serta memfasilitasi negosiasi harga dan volume ekspor. Dalam salah satu wawancara, seorang diplomat senior di KJRI Karachi menyatakan:

“Kami memetakan siapa saja pemain utama di sektor pengolahan minyak nabati di Pakistan, dan secara langsung menghubungkan mereka dengan eksportir Indonesia. Beberapa di antaranya kemudian menandatangani MoU setelah forum temu dagang berlangsung.”

Selain forum tatap muka, KJRI juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi daring antara pelaku usaha melalui platform Zoom dan WhatsApp group yang diinisiasi sejak masa pandemi. Fasilitasi komunikasi digital ini menjadi penting mengingat kendala geografis, waktu, serta fluktuasi kondisi politik di Pakistan. Model komunikasi semipermanen seperti ini juga membantu mempertahankan kesinambungan hubungan antara eksportir dan pembeli.

Aspek lain dari *facilitation* terlihat dalam peran KJRI membantu penyelesaian hambatan logistik dan administratif. Sebagai contoh, selama krisis ekonomi Pakistan pada akhir 2022, beberapa bank lokal mengalami pembatasan devisa dan menunda penerbitan *letter of credit* (L/C) untuk pembelian minyak sawit. Hal ini sempat menyebabkan penundaan pengiriman dan kekhawatiran di kalangan eksportir Indonesia. Dalam kondisi ini, KJRI mengambil inisiatif untuk mengkomunikasikan masalah ini secara langsung kepada otoritas perdagangan Pakistan dan menyampaikan laporan situasi kepada Kementerian Perdagangan RI serta GAPKI. Beberapa perusahaan juga dibantu secara informal dalam mengatur jadwal ulang pengiriman dan mendapatkan dukungan dari mitra perbankan di Karachi.

Fungsi fasilitasi juga mencakup dukungan terhadap keperluan teknis ekspor seperti penerjemahan dokumen, pembaruan sertifikasi halal, serta pelatihan orientasi pasar bagi eksportir baru. KJRI Karachi menyediakan paket informasi tentang prosedur bea masuk, regulasi lokal, dan daftar importir terpercaya di wilayah Sindh. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari inisiatif layanan diplomasi ekonomi yang berbasis permintaan (*on-demand commercial diplomacy*).

Data dari dokumen internal KJRI Karachi menunjukkan bahwa selama tahun 2022 saja, terdapat lebih dari 25 fasilitasi langsung yang dilakukan oleh tim ekonomi dan perdagangan, baik dalam bentuk mediasi komunikasi, konsultasi bisnis, maupun pendampingan administratif. Sebagian besar permintaan datang dari pelaku usaha kecil-menengah yang belum memiliki jaringan dagang yang kuat di Pakistan. Peran fasilitatif KJRI menjadi

sangat penting dalam membangun kepercayaan awal dan membantu penetrasi pasar.

Dari perspektif *kerangka kerja FAR*, dimensi *facilitation* yang dijalankan oleh KJRI Karachi menunjukkan pendekatan proaktif dan berorientasi hasil (*result-based facilitation*). Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolik atau formal, tetapi diarahkan pada pencapaian konkret dalam bentuk transaksi, pembentukan kemitraan dagang, serta pembukaan akses pasar. Ini mencerminkan bahwa diplomasi komersial yang dijalankan tidak hanya bersifat promosi satu arah, melainkan melibatkan strategi hubungan bisnis jangka panjang.

Diplomasi Komersial dalam Dimensi Advisory

Dimensi *advisory* dalam diplomasi komersial merujuk pada fungsi perwakilan diplomatik untuk menyediakan informasi strategis, analisis pasar, serta saran kebijakan kepada pemangku kepentingan domestik terkait dinamika ekonomi dan perdagangan di negara akreditasi. KJRI Karachi menjalankan peran ini melalui berbagai bentuk diseminasi informasi, baik formal maupun informal, kepada eksportir dan institusi pemerintah Indonesia.

KJRI secara rutin menyusun laporan perkembangan pasar minyak nabati di Pakistan yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, serta asosiasi industri seperti GAPKI dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Laporan tersebut mencakup pembaruan harga minyak sawit, tren permintaan di pasar Pakistan, perubahan kebijakan bea masuk, fluktuasi nilai tukar, serta perkembangan logistik pelabuhan di

Karachi dan Port Qasim. Informasi ini digunakan sebagai basis bagi pengambilan keputusan ekspor dan penyesuaian strategi promosi perdagangan.

Dalam salah satu dokumen komunikasi internal KJRI, disebutkan bahwa:

“Pasar Pakistan menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap harga internasional dan tekanan inflasi domestik. Karena itu, strategi pengiriman sebaiknya dilakukan dalam kuartal kedua ketika harga domestik relatif stabil.”

Peran *advisory* juga terlihat dalam penyampaian informasi dini terkait risiko ekonomi makro. Pada awal 2023, saat Pakistan mengalami krisis defisit neraca pembayaran dan cadangan devisa berada pada titik terendah, KJRI Karachi mengeluarkan imbauan kepada pelaku usaha Indonesia agar melakukan diversifikasi pasar dan mengevaluasi risiko ketergantungan tunggal terhadap pasar Pakistan. Imbauan ini diperkuat dengan data bahwa penundaan pembayaran L/C meningkat hampir 40% pada kuartal pertama 2023, yang berisiko menyebabkan kegagalan kontrak pengiriman.

Selain laporan formal, KJRI juga menyediakan layanan konsultasi *ad hoc* kepada eksportir yang menghubungi langsung perwakilan diplomatik. Banyak eksportir yang tidak memiliki mitra dagang permanen atau jaringan lokal mengandalkan informasi dan analisis yang diberikan oleh KJRI dalam membuat keputusan bisnis. Beberapa contoh bantuan yang diberikan meliputi klarifikasi tarif dan pajak tambahan, verifikasi izin importir, serta interpretasi peraturan perdagangan baru yang diberlakukan oleh Federal Board of Revenue Pakistan.

Dalam menjalankan fungsi *advisory*, KJRI juga bekerja sama dengan mitra lokal, termasuk konsultan bisnis Pakistan dan asosiasi pengimpor. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat terkini, kontekstual, dan sesuai dengan praktik lapangan. Sebagai contoh, KJRI menugaskan staf perdagangan untuk menghadiri pertemuan dengan Pakistan Vanaspati Manufacturers Association (PVMA) guna mendapatkan *insight* terkait kebijakan penyerapan minyak sawit oleh industri pengolahan lokal.

Peran *advisory* juga mencakup penyampaian saran kebijakan kepada pemerintah Indonesia berdasarkan pengalaman lapangan. Misalnya, dalam konteks larangan ekspor sementara oleh Indonesia pada April 2022, KJRI Karachi menyampaikan laporan evaluatif yang menjelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap persepsi pasar dan risiko kehilangan pangsa pasar terhadap kompetitor seperti Malaysia. Laporan ini menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan pasca-pembukaan kembali ekspor minyak sawit.

Jika ditinjau dari kerangka *FAR*, fungsi *advisory* KJRI Karachi menunjukkan pendekatan berbasis bukti dan konteks (*evidence-informed and context-aware advisory*). Penyaluran informasi dilakukan secara responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan eksportir, bukan hanya sebagai laporan birokratis rutin. Hal ini meningkatkan kredibilitas perwakilan diplomatik di mata pelaku usaha dan mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang dinamis antara negara dan pelaku pasar.

Advisory yang efektif juga memperkuat dimensi fasilitasi dan representasi, karena informasi yang disampaikan mendasari keputusan partisipasi dalam forum dagang dan

pemilihan mitra kerja sama. Oleh karena itu, dimensi *advisory* menjadi jembatan penting antara pengamatan diplomatik dan kebijakan promosi ekspor yang lebih adaptif dan realistis.

Diplomasi Komersial dalam Dimensi Representation

Dimensi *representation* dalam diplomasi komersial merujuk pada kehadiran simbolik dan aktif perwakilan negara dalam berbagai forum ekonomi dan publik, guna memperkuat eksistensi nasional dan membentuk persepsi positif terhadap produk ekspor. Dalam konteks ini, KJRI Karachi menjalankan fungsi representatif melalui partisipasi dalam pameran dagang, forum bisnis bilateral, promosi media, serta advokasi terhadap citra minyak sawit Indonesia.

Salah satu bentuk representasi diplomatik yang dilakukan oleh KJRI Karachi adalah partisipasi dalam forum dagang dan pameran sektor minyak nabati di Pakistan. Misalnya, pada tahun 2022, KJRI berperan aktif dalam kegiatan *Pakistan Oilseed Summit* dan *Halal Expo Pakistan*, di mana delegasi Indonesia menampilkan produk minyak sawit olahan serta menjalin komunikasi dengan pengusaha lokal dan importir utama. Dalam acara tersebut, Konsul Jenderal menyampaikan pidato yang menekankan komitmen Indonesia terhadap perdagangan yang berkelanjutan dan keterbukaan pasar.

Selain kehadiran formal, fungsi representasi juga dijalankan melalui keterlibatan dalam media lokal dan publikasi opini di surat kabar Pakistan. KJRI menugaskan staf informasi untuk menulis artikel opini dan siaran pers yang menjelaskan pentingnya minyak sawit bagi ketahanan pangan dan industri makanan Pakistan. Dalam salah satu publikasi di harian *Dawn*, disebutkan:

“Minyak sawit Indonesia berperan vital dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di Pakistan, terutama pada masa krisis pasokan global akibat konflik geopolitik.”

Kegiatan representasi juga dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang bersifat informal, seperti dialog bisnis bilateral, kunjungan kehormatan ke asosiasi pengusaha, serta pertemuan dengan pejabat Kamar Dagang dan Industri Karachi (KCCI). Dalam beberapa kasus, KJRI turut menginisiasi kerja sama branding produk Indonesia dengan jaringan ritel modern Pakistan untuk meningkatkan visibilitas produk berbasis sawit di pasar konsumen.

Dalam konteks diplomasi multilateral, KJRI juga bertindak sebagai penghubung antara Indonesia dan negara-negara sahabat yang memiliki kepentingan dalam isu kelapa sawit. Melalui dialog tiga pihak yang melibatkan Malaysia, Indonesia, dan Pakistan, KJRI memfasilitasi pertukaran posisi kebijakan serta advokasi terhadap narasi keberlanjutan industri sawit ASEAN. Strategi ini menjadi penting mengingat meningkatnya tekanan dari kelompok lingkungan dan regulasi global yang menargetkan minyak sawit sebagai produk kontroversial.

Representasi diplomatik juga dilakukan dengan pendekatan simbolik, seperti penyelenggaraan “Indonesian Palm Oil Day” di Karachi. Acara ini menghadirkan demonstrasi memasak dengan minyak sawit, testimoni dari pengusaha lokal, serta penyuluhan gizi yang menekankan manfaat minyak sawit. Melalui kegiatan ini, diplomasi komersial diperluas ke ranah budaya dan komunikasi publik sebagai strategi pencitraan positif.

Jika ditinjau dari *kerangka kerja FAR*, fungsi *representation* yang dijalankan oleh KJRI Karachi mencerminkan pendekatan integratif antara promosi produk dan promosi citra nasional (*nation-branding through trade*). Representasi yang dilakukan tidak hanya menciptakan eksistensi diplomatik, tetapi juga memperkuat persepsi terhadap produk Indonesia dalam lanskap narasi lokal. Peran ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan ekspor dalam jangka panjang dan melawan kampanye negatif terhadap industri sawit.

Tantangan dan Strategi Adaptif KJRI Karachi

Meskipun fungsi diplomasi komersial telah dijalankan secara aktif oleh KJRI Karachi dalam mendukung ekspor minyak sawit Indonesia, terdapat berbagai tantangan signifikan yang harus dihadapi. Tantangan ini berasal baik dari dinamika internal kebijakan Indonesia maupun dari kondisi makroekonomi dan politik di Pakistan. Untuk merespons hal tersebut, KJRI Karachi menerapkan sejumlah strategi adaptif guna memastikan kelangsungan hubungan dagang bilateral dan menjaga kepercayaan mitra lokal.

Salah satu tantangan utama adalah kebijakan larangan ekspor minyak sawit yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia pada April–Mei 2022. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri, namun berdampak langsung terhadap mitra dagang internasional termasuk Pakistan. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak sawit dari Indonesia, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian di pasar dan memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan.

Dalam konteks ini, KJRI Karachi menghadapi tekanan dari pengusaha lokal, asosiasi pengimpor, dan otoritas Pakistan yang meminta penjelasan dan jaminan kelanjutan pasokan.

Sebagai respons, KJRI mengaktifkan jalur komunikasi diplomatik informal (backchannel diplomacy) dengan pejabat di Kementerian Perdagangan dan pelaku industri untuk menyampaikan kekhawatiran mitra Pakistan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan strategis di kawasan Asia Selatan tetap menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan larangan ekspor. Selain itu, KJRI juga mempersiapkan materi komunikasi krisis untuk meredam persepsi negatif dan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan dalam rangka melindungi kepentingan domestik yang lebih luas.

Tantangan kedua yang dihadapi KJRI Karachi adalah krisis ekonomi makro di Pakistan. Sepanjang tahun 2022–2023, negara tersebut mengalami tekanan fiskal dan moneter yang berat, termasuk defisit neraca perdagangan, inflasi tinggi, serta cadangan devisa yang semakin menipis. Hal ini berdampak langsung pada keterbatasan pembiayaan perdagangan, terutama melalui hambatan dalam penerbitan *letter of credit* (L/C) oleh bank-bank lokal. Krisis ini menyebabkan banyak kontrak ekspor minyak sawit tertunda atau dibatalkan karena tidak adanya jaminan pembayaran dari pihak pembeli.

Untuk menghadapi situasi ini, KJRI menjalankan strategi adaptif dengan memperkuat fungsi intelijen pasar dan memberikan peringatan dini kepada eksportir Indonesia. Dalam laporan kuartalan yang disusun oleh tim perdagangan KJRI, disampaikan bahwa eksportir disarankan untuk mengevaluasi risiko pembayaran dan

menyusun skema pembiayaan alternatif. Beberapa perusahaan yang memiliki kemitraan jangka panjang dengan importir lokal bahkan dibantu untuk mengatur ulang kontrak pengiriman secara bertahap sesuai kapasitas likuiditas pembeli.

Selain aspek ekonomi, tantangan politik juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja diplomasi komersial. Ketidakstabilan politik di Pakistan, termasuk pergantian pemerintahan dan unjuk rasa besar-besaran, menyebabkan terganggunya proses pengambilan keputusan di sektor perdagangan dan investasi. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan pertemuan dagang atau forum promosi harus dibatalkan atau ditunda karena alasan keamanan atau keputusan administratif mendadak dari otoritas lokal. KJRI merespons situasi ini dengan melakukan pendekatan bertahap dan fleksibel, termasuk menjadwalkan ulang kegiatan secara virtual atau melakukan koordinasi langsung dengan asosiasi dagang untuk mempertahankan momentum kerja sama.

Secara umum, respons KJRI terhadap tantangan-tantangan tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi diplomasi komersial dalam situasi krisis. Fungsi *facilitation* tetap dijalankan melalui komunikasi terbuka dengan pelaku usaha, fungsi *advisory* ditingkatkan melalui laporan risiko pasar, dan fungsi *representation* tetap dijaga melalui kehadiran simbolik serta aktivitas diplomasi ekonomi yang disesuaikan dengan situasi.

Dari perspektif *kerangka kerja FAR*, strategi adaptif KJRI Karachi mencerminkan praktik diplomasi yang bersifat fleksibel, responsif, dan berorientasi solusi (solution-oriented diplomacy). Kemampuan untuk mempertahankan hubungan dagang di

tengah tekanan eksternal menjadi indikator keberhasilan peran diplomatik, terutama dalam menjaga keberlangsungan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar yang rentan namun strategis seperti Pakistan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan diplomasi komersial oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Karachi dalam mendukung ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan selama periode 2022–2023. Berdasarkan analisis menggunakan *kerangka kerja FAR* (Facilitation, Advisory, Representation), ditemukan bahwa KJRI Karachi menjalankan peran strategis dalam mengelola dinamika hubungan dagang bilateral yang kompleks dan penuh tantangan.

Pertama, dalam dimensi *facilitation*, KJRI Karachi secara aktif menjembatani hubungan antara eksportir Indonesia dan importir Pakistan. Fungsi ini dijalankan melalui penyelenggaraan *business matching*, forum dagang bilateral, fasilitasi komunikasi daring, serta dukungan administratif dan logistik dalam proses ekspor. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap pembentukan jejaring dagang, kelancaran arus barang, dan penyelesaian hambatan teknis dalam proses perdagangan.

Kedua, dalam dimensi *advisory*, KJRI menjalankan peran informatif dan strategis dengan menyediakan analisis pasar, laporan risiko, dan saran kebijakan kepada para pemangku kepentingan di Indonesia. Fungsi ini membantu eksportir dalam memahami situasi pasar Pakistan secara kontekstual dan responsif, terutama dalam

menghadapi fluktuasi harga, kebijakan perdagangan lokal, serta risiko makroekonomi. KJRI juga memberikan masukan penting kepada pemerintah Indonesia mengenai dampak kebijakan domestik terhadap persepsi dan stabilitas pasar ekspor.

Ketiga, dalam dimensi *representation*, KJRI aktif membangun citra positif Indonesia dan minyak sawit melalui partisipasi dalam forum bisnis, media lokal, diplomasi budaya, serta kerja sama dengan asosiasi pengusaha. Representasi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk Indonesia di pasar Pakistan, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam membentuk opini publik dan persepsi pemangku kepentingan lokal terhadap keberlanjutan dan manfaat minyak sawit.

Selain menjalankan fungsi *FAR*, KJRI Karachi juga menunjukkan kapasitas adaptif dalam menghadapi tantangan kebijakan ekspor dari Indonesia dan krisis ekonomi di Pakistan. Strategi responsif seperti komunikasi informal, peringatan risiko, dan penyesuaian pendekatan diplomatik membuktikan bahwa diplomasi komersial mampu berperan sebagai instrumen stabilisasi hubungan dagang dalam kondisi krisis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa diplomasi komersial yang dijalankan oleh KJRI Karachi merupakan wujud konkret dari operasionalisasi strategi ekspor Indonesia di pasar non-tradisional. Dengan mengintegrasikan fungsi *facilitation*, *advisory*, dan *representation*, KJRI berperan tidak hanya sebagai penghubung dagang, tetapi juga sebagai aktor diplomatik yang berkontribusi terhadap ketahanan ekspor dan penguatan ekonomi nasional di level global.

Penggunaan *kerangka kerja FAR* terbukti relevan dalam menganalisis peran diplomasi komersial secara sistematis dan terstruktur. Kerangka ini memberikan instrumen konseptual yang memadai untuk memetakan aktivitas diplomatik yang bersifat multidimensi, serta menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan secara fungsional di tingkat konsuler.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications.

Artikel Jurnal

- Naray, O. (2008). Commercial diplomacy: A conceptual overview. *The Hague Journal of Diplomacy*, 3(1), 1–27.
- Rüel, H. J. M., & Zuidema, L. (2012). The effectiveness of commercial diplomacy: A survey among Dutch embassies and consulates. *Discussion Papers in Diplomacy*, (123), 1–54.
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1-2), 7–36.
- Riady, C., Badarul, K., & Hii, H. (2023). Analisis upaya Indonesia dalam melawan black campaign minyak kelapa sawit dari Uni Eropa. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Tanjungpura.

Laporan dan Dokumen Resmi

- GAPKI. (2023). *Laporan Tahunan GAPKI 2023*. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Diplomasi Ekonomi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
- Kostecki, M., & Naray, O. (2007). *Commercial Diplomacy and International Business*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- BPS. (2023). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- Kementerian Luar Negeri. (2021). *RENSTRA KJRI Karachi 2020–2024*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://www.kemlu.go.id/>

Berita dan Sumber Web

- Ahmed, K. (2022, November 9). Pakistan's central bank restricts outflow of dollars to ease pressure on rupee. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/>
- Antara News. (2023). KJRI Karachi fasilitasi *business matching* ekspor sawit. <https://www.antaraneews.com/>
- Aulia, M. H. P. (2023, August 3). Kakao, kopi & sawit, mana penyumbang ekspor terbesar RI? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/>
- Dawn. (2022). Indonesia's palm oil export ban sparks supply concerns in Pakistan. <https://www.dawn.com/>
- GAPKI. (2018, January 17). Perkembangan mutakhir industri

minyak sawit Indonesia.
<https://gapki.id/>

GAPKI. (2024, January 19). *Feature: Maintaining Pakistani palm market amid growing EU barriers.*
<https://gapki.id/en/news/>

PASPI. (2024, March 15). Mengenal CPO. *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.*
<https://palmoilina.asia/>

Nation. (2022, June 17). Pakistan to receive edible oil shipment from Indonesia: PM Shehbaz.
<https://www.nation.com.pk/>